

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 1996, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi. UMM Press, Malang.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Lontoh, Rudy A. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Hartiman. 1999. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undnag Kepailitan*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Rahadiyan, Inda. 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. UII Press, Yogyakarta.
- Sanjaya, Umar Haris. 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.

- Sinaga, Syamsudin Manan. 2014. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama. Gama Media Printing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti. 1999. *Aspek Aspek Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- Subhan, M. Hadi. 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suyatno, R Anton. 2017, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Edisi Pertama. Kencana Preneda Media Group, Jakarta.
- Tumbuan, Fred BG dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). 2001. *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

- Azhari, Hary. 2017. “Akibat Hukum Kelalaian Debitor Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahakamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Barnini, A., N. Suryanti, dan A. Artaji. 2021. “Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”. *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4 No. 2.

- Harsono, Ivan dan Paramita Prananingtyas. 2019, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”. *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), ISSN: 2086-1702.
- Harsono, Ivan dan Paramita Prananingtyas. 2019. “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), ISSN: 2086-1702.
- Hayati, Kemala Atika. 2016. “Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *USU Law Journal*.
- Hermanshah, Teukoe. 2018. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencegah Kepailitan”. *Law Review*, XVII.
- Ishak. 2016, “Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18 No.1 April 2016.
- Nisa, Cholifatun. 2019. “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas”. *Jurnal Jurist-Diction*.
- Kornelis, Yudi. 2016, “Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia”. *Jurnal Selat*, Vol.4 No.1, P-ISSN 2354-8649 : E-ISSN 2579-5767.
- Rahmadiyanti, Rindy Ayu. 2015. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Notarius*, Edisi 08 Nomor 2, ISSN:2086-1702.
- Sriwijastuti. 2010. “Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)” Tesis Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Homologasi Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, perihal Pengesahan Homologasi Perjanjian Perdamaian antara PT Northcliff Indonesia dengan Para Kreditornya, 17 Desember 2020.

E. Internet

Alfin Sulaiman, “Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar Dalam Putusan Perdamaian PKPU” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d110ea03f49/jika-nama-kreditor-takterdaftar-dalam-putusan-perdamaian-pkpu>, diakses pada 2 Oktober 2022.